

# MEMADAMKAN EGO SEKTORAL DALAM MENDUKUNG GOVERNMENT TECHNOLOGY

Ditujukan Kepada:  
Kementerian/Lembaga  
Pemerintah Daerah

Policy Brief ini di tulis oleh:  
Kemal Hidayah  
Mayahayati Kusumaningrum  
Tri Noor Aziza

## PENDAHULUAN

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Prestasi digital Indonesia meningkat, namun implementasi *GovTech* masih terkendala oleh ego sektoral di kalangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda). Pembentukan Satu Data Indonesia terhambat oleh enggan berbagi data dari sejumlah K/L/Pemda. Ego sektoral juga dapat berdampak negatif terhadap penerapan *GovTech*, salah satunya adalah menghambat efisiensi pelayanan publik dan inovasi pemerintah secara keseluruhan. Solusi alternatif meliputi pembentukan *Squad* Tim lintas K/L/Pemda, Penghargaan bagi yang berbagi data, prosedur berbagi data yang efektif, dan integrasi aplikasi. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan kolaborasi dan kebijakan integrasi pakai data antar K/L/Pemda.

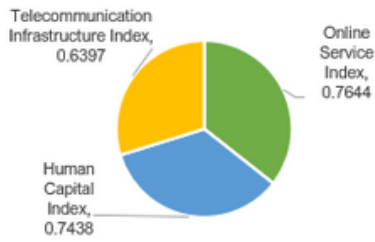
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres No. 82 tahun 2023 dalam rangka mempercepat kemajuan digital dan interoperabilitas sistem yang ada di pemerintahan. Tiga pilar utama Perpres tersebut adalah memperkuat tata kelola melalui keterlibatan kementerian koordinator dan kementerian lembaga, membangun kemampuan implementasi pemerintah melalui *GovTech*, serta fokus pada layanan digital prioritas melalui integrasi dan interoperabilitas.

Di tahun 2024, Pemerintah telah menargetkan untuk meluncurkan portal layanan digital nasional atau *GovTech* yang merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan publik. *GovTech* diharapkan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah, seperti birokrasi yang berbelit-belit, pelayanan publik yang tidak merata, dan korupsi. Presiden juga telah memberikan arahan mengenai delapan langkah percepatan transformasi digital, termasuk pemangkasan proses bisnis, keamanan data, dan transformasi kebijakan pengadaan barang dan jasa terkait digital.

E-Government Rank Indonesia Tahun 2016-2022



3 Komponen E-Gov Development Indeks (EGDI) Indonesia Tahun 2022



Sumber: (Publicadministration.un.org, 2024)

Presiden juga menetapkan nama resmi untuk *GovTech* Indonesia, yaitu “INA Digital” atau “Indonesia Digital”. Ke depannya diharapkan Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi single sign on, efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat/ *citizen centric*, dalam satu portal nasional terintegrasi dan bukan lagi pada pendekatan instansi seperti sebelumnya.

Prestasi digital Indonesia hingga saat ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2022, hasil survei PBB menunjukkan peringkat Indonesia terus meningkat ke peringkat 77 yang mengindikasikan peningkatan upaya pemanfaatan teknologi informasi meliputi penyediaan layanan online, konektivitas telekomunikasi, dan kapasitas manusia, namun penerapan *GovTech* di Indonesia masih belum optimal. Salah satu faktor yang menghambatnya adalah ego sektoral yang masih tinggi di kalangan K/L/Pemda (Kompas, 2023). Ego sektoral ini dapat menyebabkan K/L/Pemda saling bersaing dan tidak mau bekerja sama. Akibatnya, koordinasi dan integrasi antar K/L/Pemda menjadi terhambat.

## DESKRIPSI MASALAH

Rencana pemerintah membuat Satu Data Indonesia menghadapi jalan terjal karena terdapat sejumlah K/L/pemda yang enggan berbagi data untuk diakses sebagai layanan digital terintegrasi (Kompas, 2024). Namun, digitalisasi pelayanan sebenarnya bukan hanya persoalan penguasaan teknologi. Namun yang jauh lebih penting adalah persoalan komitmen dan kepemimpinan, karena digitalisasi mengharuskan adanya integrasi dan interoperabilitas, bahkan pertukaran data, sehingga tidak boleh lagi ada ego sektoral (DPR RI, 2023). Ego sektoral tersebut dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya:

1

Budaya kerja yang tidak mendukung kolaborasi antarinstansi untuk berbagi data digital dapat berdampak negatif terutama terhadap efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah, serta mempersulit koordinasi antarinstansi dalam penyusunan kebijakan berbasis data (Menpan.go.id, 2021; Unpad.ac.id, 2021). Selain itu, kurangnya kolaborasi dapat menghambat transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antarinstansi. Ketidakmampuan SDM mengakses informasi yang relevan karena keterbatasan dalam hal pemahaman dan kemampuan teknis berbagi data digital serta kurangnya pemahaman akan pentingnya berbagi dan integrasi data untuk kepentingan bersama yang tidak didorong oleh organisasi (Kominfo.go.id, 2020).

Beberapa penghargaan telah diberikan kepada K/L/Pemda yang telah berhasil meraih prestasi dalam penggunaan digital seperti inovasi pemanfaatan informasi geospasial (sikompak.bappenas.go.id, 2022), pelayanan investasi terbaik (ebtke.esdm.go.id, 2022) dan berbagi praktik baik K/L/Pemda lainnya. Namun, hingga saat ini belum ada penghargaan yang spesifik karena keberhasilan berbagi data kepada K/L/Pemda (Finance.detik.com, 2023).

2

2

3

Perbedaan standar dan format data antar K/L/Pemda dapat mengakibatkan keterbatasan dalam akses data oleh pihak luar (Diskominfo.magelangkab.go.id, 2021). Hal ini disebabkan oleh permasalahan egosektoral dari setiap instansi pemerintahan, yang memungkinkan adanya perbedaan standar dan metadata di setiap instansi pemerintah.

4

Terdapat tantangan dalam mengintegrasikan data. Pertama, kualitas data. Integrasi data mengharuskan kumpulan data berkualitas tinggi dan memiliki format/struktur standar. Pencocohan menjadi sulit/tidak mungkin dilakukan jika kualitasnya tidak setara. Kedua, ketidaksesuaian tipe data. Data satu sistem dengan sistem yang lain kebanyakan berbeda tipe (*integer dan string*) untuk konsep yang sama. Ketiga, volume data. Volume data dapat berbeda secara signifikan di antara sistem, sehingga sulit untuk mencocokkan secara akurat tanpa kehilangan informasi di salah satu basis data saat menggabungkan data ke dalam satu set catatan yang koheren. Keempat, kurangnya protokol keamanan. Banyak cara menyimpan informasi sensitif, namun tidak semua aplikasi dapat mengamankan data rahasia (Getcompass.ai. 2023).

5

Meskipun telah terdapat Perpres No. 95/2018 (SPBE) dan Perpres No. 39/2019 (Satu Data Indonesia) yang mengatur keterpaduan tata kelola SPBE dan keterpaduan tata kelola data untuk menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dibagi pakaikan, bahkan kehadiran Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 yang memperkuat perlindungan data pribadi, ternyata masih terdapat kekurangan dalam regulasi terkait validitas dan keamanan data, serta interoperabilitas data antarinstansi pemerintah.

## ALTERNATIF SOLUSI

Ego sektoral menjadi penghambat utama dalam mendukung langkah pemerintah untuk mengoptimalkan teknologi. Ada beberapa alternatif solusi yang dapat dieksplorasi untuk mengatasi hambatan ego sektoral dalam implementasi *GovTech* di Indonesia.

### Alternatif 1 Membentuk Squad Tim Integrasi Data Lintas K/L/Pemda

*Squad* tim ini terdiri dari perwakilan dari berbagai instansi pemerintah yang bekerja secara kolaboratif untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi *GovTech* dalam meningkatkan layanan publik. Dengan semangat kerjasama yang kuat, *Squad* Tim berhasil mengintegrasikan berbagai kepentingan dan mengatasi hambatan untuk menciptakan perubahan positif dalam pelayanan publik melalui teknologi.

### Alternatif 2 Memberikan penghargaan/apresiasi bagi K/L/Pemda yang berhasil mengimplementasikan praktik berbagi data

Melalui program ini, pemerintah memberikan pengakuan dan insentif kepada lembaga-lembaga yang berhasil dalam berbagi data dengan baik. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong semangat kolaborasi dan transparansi antarinstansi pemerintah, serta menghasilkan lebih banyak inisiatif yang berkontribusi pada efisiensi dan kualitas layanan publik.

3

### Alternatif 3 Membuat standar dan format data serta prosedur berbagi data

Pemerintah pusat perlu membuat standar dan format data serta prosedur yang efektif dan terperinci sehingga data yang dihasilkan memenuhi standar, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data untuk memfasilitasi berbagi data antara K/L/Pemda yang berbeda.

### Alternatif 4 Mengkluster dan mengintegrasikan aplikasi sesuai dengan manfaatnya

Diperlukan integrasi sistem yang memungkinkan berbagai aplikasi tersebut saling terhubung. Integrasi sistem dapat dilakukan melalui pengembangan API (*Application Programming Interface*) yang memungkinkan pertukaran data antaraplikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengoptimalkan *platform* tunggal (Satu Data Indonesia) yang menyediakan akses terpusat dan integrasi lintas aplikasi.

### Alternatif 5 Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung integrasi pakai data antar K/L/Pemda

Pemerintah Pusat dan Daerah perlu melakukan kolaborasi dalam pengaturan kebijakan yang mendukung integrasi pakai data antara K/L/Pemda dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai leading. Langkah ini untuk memperkuat kerja sama antarinstansi dan menciptakan kerangka kerja yang lebih efektif dalam pengelolaan dan pemanfaatan data untuk menunjang pelayanan publik.

## REKOMENDASI

Berdasarkan lima alternatif solusi yang ditawarkan dalam mengatasi ego sektoral dalam mempercepat transformasi digital pemerintah serta urgensinya, maka solusi jangka pendek yang dapat dilakukan adalah membentuk *Squad* Tim integrasi data Lintas K/L/Pemda dan Memberikan penghargaan/apresiasi bagi K/L/Pemda yang berhasil mengimplementasikan praktik berbagi data. Adapun solusi lainnya, dapat dilakukan di jangka menengah. Hal tersebut dilakukan agar upaya mengatasi ego sektoral dan mempercepat transformasi digital pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien. Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak terkait untuk menjalankan strategi ini dengan serius dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Detik.com. 2023. Pemda yang Melek Digital Bakal Dikasih Insentif dari Pemerintah. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6962728/pemda-yang-melek-digital-bakal-dikasih-insentif-dari-pemerintah>.

E-Government Knowledgebase. 2024. Retrieved from <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center>

Sekretariat Kabinet. 2024. Menteri PANRB: Presiden Instruksikan Percepatan GovTech untuk Pelayanan Publik. Retrieved from <https://setkab.go.id/menteri-panrb-presiden-instruksikan-percepatan-govtech-untuk-pelayanan-publik/>